

BAB III
**HUKUMAN JINAYAH TERHADAP ANAK DALAM ISLAM, UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DI INDONESIA DAN AKTA
KANAK-KANAK 2001, (AKTA 611) DI MALAYSIA.**

A. Hukuman Islam

Islam telah menerangkan dengan jelas tentang definisi anak yaitu secara umumnya anak adalah seseorang yang belum baligh dan belum dianggap dewasa atau belum bertanggung beban dan taklif ke atasnya sebagai seorang Muslim yang terkait dosa dan pahala kepada dirinya. Dasar hukum Islam ini diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Daud menyatakan bahwa diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis orang yaitu orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, orang gila sampai ia sembuh. Jika anak-anak kecil ini melakukan suatu tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok, membunuh atau melukai dan sebagainya maka anak kecil itu tidak berdosa, karena anak tersebut tidak mendapatkan beban syariat yang belum mencukupi syarat sebagai seorang muslim yang bisa diberikan hukuman terhadap dirinya.

Secara mudah difaham, anak yang belum baligh atau kebiasaan berumur di bawah 15 (lima belas) tahun, beban pidana secara penuh ke atas dirinya belum lagi dikenakan. Jika anak itu melakukan pencurian ia tidak dikenakan hukuman potong tangan dan jika seorang anak itu melakukan suatu pembunuhan, maka ia tidak dikenakan hukuman qisas dan jika seorang anak melakukan perzinaan, ia tidak akan dikenakan hukuman cambuk seratus kali tidak sama seperti orang dewasa¹. Menurut ulama' fikih hukuman yang bersifat *ta'dibiyah* diberikan yaitu hukuman yang bersifat tarbiyah untuk diri anak agar anak tersebut dibimbing dan dididik untuk berubah menjadi insan yang memberi bermanfaat

¹ Abdul Azis Dahlan *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1227.

serta diberi peluang untuk kedua kalinya untuk menjadi manusia yang mempunyai kebaikan.²

Adapun jika kesalahan seorang anak yang melibatkan perbuatan dalam merusak harta orang lain, seorang anak itu wajib membayar ganti rugi jika pemiliknya mahu menuntut ganti rugi terhadapnya sama ada sebelum mumaiyiz maupun selepas mumaiyiz. Anak tersebut wajib membayar hak pemiliknya menggunakan hartanya sendiri. Jika anak itu tidak mempunyai harta, maka penanggung jawab anak tersebut seperti kedua orang tuanya akan membayar bagi pihak anak tersebut³. Masalah ini tidak ada perbezaan pendapat diantara para ulama' dan masalah ini telah sepakat dari kebanyakan jumbuh ulama'.

B. Hukuman Dalam Undang-Undang Indonesia

Menurut undang-undang yang termaktub di negara Indonesia, hukuman *jinayah* terhadap anak disebut sebagai sanksi pidana anak. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang diberikan terhadap anak dikenakan mengikut jenis-jenis pidana dan tindakan-tindakan yang akan dikenakan terhadap anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 83. Pasal-pasal tersebut diatur sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu⁴ :

a. Pidana peringatan

Pidana peringatan adalah merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat

² Abdul Azis Dahlan *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1227.

³ Abdul Azis Dahlan *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1227.

⁴ Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :

1. Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Seorang Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.⁵
- b. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:⁶
 - i-mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
 - ii-mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
 - iii-mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
 - iv-mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Jika selama program pembinaan, anak tersebut telah melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.⁷

2. Pidana Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Pidana pelayanan masyarakat pidana yang dimaksudkan adalah untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang baik dan positif.⁸
- b. Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang

⁵ Pasal 74 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Pasal 75 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Pasal 75 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 76 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

dikenakan terhadapnya.⁹

- c. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.¹⁰
3. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.¹¹ Terkait dengan anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹²

Secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut :¹³

- a. Perkara Hakim yang terkait menjatuhkan hal pidana penjara terhadap tertuduh yang paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.
- c. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- e. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- g. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

⁹ Pasal 76 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Pasal 76 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Pasal 77 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Pasal 77 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

h. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, maka Anak harus mengikuti dan wajib dikenakan ke atasnya belajar selama 9 (sembilan) tahun.

2. Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut

a. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.¹⁴

b. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

3. Pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.¹⁵

b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.¹⁶

c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.¹⁷

d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.¹⁸

4. Pidana penjara ada beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.¹⁹

b. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang

¹⁴ Pasal 78 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Pasal 80 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶ Pasal 80 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Pasal 80 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Pasal 80 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹ Pasal 79 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- dewasa.²⁰
- c. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.²¹
 - d. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.²²
 - e. Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.²³
 - f. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) yaitu dari maksimum dalam ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.²⁴
 - g. Pembinaan di LPKA sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁵
 - h. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.²⁶
 - i. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.²⁷
 - j. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana akan dijatuhkan terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.²⁸

5. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, bisa dijatuhkan kepada anak yang melakukan kesalahan pidana yaitu berupa :²⁹

²⁰ Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Pasal 79 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Pasal 79 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Pasal 81 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Pasal 81 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ Pasal 81 ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Pasal 71 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

6. Hukuman Tindakan

Selain sanksi pidana, ada juga sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah terbukti secara sah bersalah yaitu:

- a. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :³⁰
 - 1. pengembalian kepada orang tua/Wali.
 - 2. penyerahan kepada seseorang;
 - 3. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 4. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS;
 - 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6. Pencabutan surat izin mengemudi;
 - 7. Perbaikan akibat tindak pidana
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.³¹ Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak

³⁰ Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³¹ Pasal 82 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

7. Proses Peradilan Pidana Anak

Batas umur Anak untuk diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis yaitu anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan sebagai dasar keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:³²

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari³³. Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh

³² Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi. Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

8. Tahapan Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta penyidik dalam perkara pidana anak adalah penyidik anak yang telah memenuhi syarat sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁴ sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari

³⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 109.

Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.³⁵

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.³⁶

9. Tahapan Penangkapan dan Penahanan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.³⁷

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

- a. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

³⁵ Pasal 27 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁶ Pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 156

- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
- d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- e. Biaya bagi setiap Anak yang telah ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Disamping itu, Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan diambil mendapat bantuan laporan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:³⁸

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga.
- b. masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
 - c. Penahanan untuk kepentingan kepada penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga LPAS.

Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS

³⁸ Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

setempat.³⁹ Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.⁴⁰ Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Jika dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah berakhir dan Hakim belum mengeluarkan atau memberikan apa-apa putusan pendakwaan terhadap anak, maka pesalah anak ini wajib dikeluarkan dan dilepaskan berdasarkan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan.⁴¹ Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib hukum. dalam memberitahu kepada anak dan orang tua/Wali tentang hak memperoleh bantuan hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, karena sebab tersebut maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.⁴²

10. Tahapan Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses

³⁹ Pasal 33 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁰ Pasal 34 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴¹ Pasal 35 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴² Pasal 40 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi.⁴³ Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁴⁴

11. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Orang yang layak dan bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi.⁴⁵ Anak akan disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan yaitu awal dari sidang orang dewasa.⁴⁶ Hakim akan memeriksa sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

⁴³ Pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

⁴⁴ Pasal 42 (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 42 (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵ Pasal 52 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁶ Pasal 53 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak ketika sidang. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan. Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Adapun dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan suatu putusan perkara, jika bertentangan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas segalanya tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka

putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.⁴⁷ Untuk itu, pengadilan wajib memberiakan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau para advokat atau para pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum. Terkait dengan hal laporan penelitian yang diberikan, seperti yang dimaksud di atas tentang hal laporan penelitian kemasyarakatan sebenarnya tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.⁴⁸ Untuk itu, pengadilan wajib memberiakan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

⁴⁷ Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁸ Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Hukuman Dalam Undang-Undang Malaysia

Menurut Undang-Undang di negara Malaysia, hukuman yang dikenakan terhadap anak yang melakukan perbuatan *jinayah* telah termaktub di bawah *Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)*. Metode hukuman yang dijatuhkan terhadap anak di negara ini adalah seperti berikut:

1. Syarat pelaksanaan hukuman terhadap anak

Berdasarkan *prosiding jinayah*, seseorang anak dikenakan bebanan sekiranya telah mencapai umur yang boleh dikenakan tanggungan jenayah seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang berikut:

Seksyen 82 Kanun Kesiksaan memperuntukkan bahawa tidak menjadi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh seorang anak yang berumur di bawah sepuluh tahun.⁴⁹ Anggapan bahawa anak-anak ini tidak berupaya melakukan kesalahan *jinayah* karena:

- a. Perkara tersebut adalah suatu yang tidak boleh diperdebatkan. *Seksyen* ini memberikan perlindungan kepada anak-anak di bawah sepuluh tahun yang melakukan kesalahan *jinayah* kerana dia dianggap sebagai *doli incapax* (tidak berupaya melakukan kesalahan) dan dianggap belum dapat dikenakan bebanan hukum di atas perbuatannya.
- b. *Seksyen 83 Kanun Kesiksaan* memperuntukkan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur lebih daripada sepuluh tahun dan kurang daripada dua belas tahun yang belum cukup matang pemahamannya untuk membuat pertimbangan mengenai keadaan dan kesan perbuatannya pada masa itu, adalah tidak menjadi satu kesalahan.⁵⁰ Peruntukan dalam *seksyen* ini adalah tidak mutlak dan bersyarat. anak-anak pada peringkat umur

⁴⁹ Mimi Kamariah Majid *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan Pindaan Undang-Undang Berkenaan Gejala Sosial* (KL: Penerbit Universiti Malaya, 2002), hlm. 3.

⁵⁰ Mimi Kamariah Majid *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan Pindaan Undang-Undang Berkenaan Gejala Sosial* (KL: Penerbit Universiti Malaya, 2002), hlm. 3.

ini masih dianggap sebagai *doli incapax* tetapi anggapan tersebut boleh dibuang dan tergantung pada suatu tahap pemahamannya terhadap keadaan dan akibat perbuatan *jinayah* yang dilakukannya.

Hal ini menurut *seksyen 82 dan 83* tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang berumur lebih daripada dua belas tahun namun di bawah lapan belas tahun boleh dikenakan bebanan *jinayah* jika dinyatakan kesalahan mengikut ketentuan yang tertuang di bawah *Akta Kanak-kanak*. Namun demikian, tahap umur yang ditetapkan ini dikatakan sebagai khayalan perundangan (*legal fiction*) karena pada hakikatnya kanak-kanak yang berusia bawah sepuluh tahun sudah mampu melakukan *jinayah*.

2. Peradilan Bagi Anak di Malaysia

Peradilan di negara Malaysia disebut *Mahkamah*. Jika di Indonesia disebut Peradilan Pidana Anak, namun di Malaysia disebut sebagai *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* terdiri daripada *Majistret* yang dibantu oleh dua orang penasihat, laki-laki dan wanita.⁵¹ Adapun dalam sidang *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak*, terdapat penasihat yang menjalankan tugas untuk menasihati. Fungsi penasihat adalah menjelaskan dan menasihati *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* tentang segala pertimbangan yang menyentuh perintah yang dibuat bagi suatu kesalahan yang sudah terbukti.

Pada waktu tersebut penasihat akan menasihati dan mencadangkan kepada *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* ini tentang hal menyentuh perlakuan lain yang terkait terhadap anak dan kesan yang akan terjadi terhadap anak pada satu tempoh jika perkara tersebut dibawa ke hadapan dan jika perlu penasihat ini akan menasihati ibu atau bapa atau penjaga anak-anak itu. *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* bersidang sama ada di dalam ruang binaan atau kamar yang berbeda daripada persidangan yang lain. *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* ditetapkan

⁵¹ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 11(2) Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)

persidangan pada hari yang berbeda daripada hari persidangan-persidangan yang lain. Persidangan bagi anak dibuat dalam suasana persidangan tertutup untuk menjaga psikologi anak berbeda dengan persidangan-persidangan yang lain.⁵²

Adapun persidangan bagi pesalah anak pidana yang akan bersidang di dalam bangunan atau tempat yang sama dengan mahkamah-mahkamah yang lain, namun di *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* terdapat pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda dengan persidangan-persidangan yang lain dari Mahkamah yang lain yang khusus untuk pesalah anak pidana ini dibawa keluar dan masuk dengan tidak ada gangguan.⁵³ *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* ini dibina dan dimasukkan di dalam undang-undang Malaysia khusus bagi anak untuk mendengar, memutuskan atau menyelesaikan apa-apa pendakwaan terhadap seseorang anak yang telah melakukan kesalahan. *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* ini juga menjalankan apa-apa wewenang yang lain dalam ketentuan yang tertuang di bawah Akta Kanak-kanak 2001 atau oleh mana-mana undang-undang tertulis yang lain. Adapun perintah yang bisa buat dan dikeluarkan oleh *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang pesalah anak ini dan sudah terbukti bersalah, maka *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* berkuasa untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

- a. Memberi peringatan dan membebaskan seorang pesalah anak
- b. Membebaskan pesalah anak itu selepas dia membayar uang jaminan yang dinamakan bon untuk berkelakuan baik dan akan mengikut apa-apa perintah yang dikenakan terhadapnya.
- c. Memerintahkan orang tua/wali atau penjaga pesalah anak itu selesaikan suatu uang jaminan(bon) untuk menjalankan pemeliharaan dan penjagaan sewajarnya.
- d. Tidak membuat membuat atau mengeluarkan suatu perintah lain, atau

⁵² Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 12(1) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁵³ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 12(2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

sebagai tambahan suatu perintah percubaan.

- e. Memerintahkan pesalah anak itu dihantar ke suatu sekolah yang diluluskan atau Sekolah Henry Gurney.
- f. Memerintahkan agar pesalah anak itu membayar denda, ganti rugi kepada korban.
- g. Disebat (dirotan).
- h. Jika pesalah anak itu berumur 14(belas) tahun ke atas dan kesalahan itu bisa dihukum dengan hukuman penjara dan terkait dengan undang-undang penjara mengikut tempoh yang dikenakan. Jika mahkamah memikirkan dan berpendapat bahwa kuasanya tidak cukup dan kurang ,maka bisa menyerahkan pesalah anak itu kepada *Mahkamah Tinggi* untuk dihukum.

Namun, *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* tiada kuasa untuk mendengar kasus-kasus yang boleh membawa hukuman mati⁵⁴ seperti membunuh, narkotika, memiliki senjata api dan sebagainya. Begitu juga dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak bersama dengan orang dewasa contohnya, merampok, membunuh, mencabul dan sebagainya bersama-sama dengan tertuduh dewasa.⁵⁵ Bagi kasus-kasus seperti ini, pesalah anak akan dibicarakan di *Mahkamah Tinggi*.

3. Perintah Terhadap Anak

Undang-undang Malaysia melarang perkataan terdakwa dan hukuman digunakan kepada pesalah anak yang disidangkan dalam *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak*. Namun Perintah tersebut diganti dengan perkataan ‘didapati bersalah’ dan ‘perintah yang dibuat karena didapati bersalah’.⁵⁶ *Mahkamah Bagi Kanak-kanak* mempunyai bidang kuasa bagi mengeluarkan perintah terhadap

⁵⁴ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 11 (5) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁵⁵ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 83 (4) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁵⁶ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91 (2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

pesalah anak yaitu:⁵⁷

4. Tempat Tahanan

Di Malaysia, ada beberapa tempat yang khusus untuk pesalah anak. Adapun tempat untuk pesalah anak ini tidak akan dicampur bersama dengan pesalah dewasa. Terdapat beberapa tempat yang dijadikan penempatan bagi pesalah anak ini dan tempat ini dinamakan tempat tahanan bagi pesalah anak. Tempat Tempat tahanan ini adalah seperti berikut:

- a. Asrama akhlak
- b. Sekolah diluluskan
- c. Sekolah Henry Gurney
- d. Penjara.

Walau apapun, pesalah anak yang melakukan kesalahan yang berat namun jika umurnya di bawah umur 10 (sepuluh) tahun, maka ia tidak bisa dihantar dan masuk di tempat tersebut. Hal ini berarti pesalah anak yang berumur lebih 10(sepuluh) tahun namun kurang 14(empat belas) tahun yang boleh ditempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang diluluskan ini.⁵⁸ Adapun pesalah anak yang ditempatkan di Sekolah Henry Gurney dan ditempatkan di penjara hanya bagi pesalah anak yang berumur 14(empat belas) tahun ke atas mengikut ketentuan yang tertuang di dalam *Seksyen 74 dan 96 Akta Kanak-kanak 2001*.

5. Fungsi-Fungsi Tempat Tahanan.⁵⁹

Anak yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat seperti sengaja menyebabkan luka yang parah terhadap orang lain, memperkosa dan melakukan kesalahan seksual terhadap orang lain maka anak yang di tempatkan di asrama akhlak ini adalah yang letakkan di bawah perintah percubaaan. Di tempat ini

⁵⁷ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91 (1) Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

⁵⁸ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 62 Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 66 Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

⁵⁹ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 98 (4) Akta Kanak- kanak 2001, (Akta 611).

pesalah anak akan dikawal dan diawasi oleh seorang pegawai akhlak agar berkelakuan dengan baik di tempat ini .

Anak ini tidak boleh melakukan kesalahan sepanjang tempoh perintah percobaan di sini. Selain di tempatkan di asrama akhlak, anak ini juga bisa ditempatkan di tempat kediaman orang tua/wali atau penjaga atau di tempat saudaranya atau suatu tempat yang lain yang sama dan sesuai seperti asrama akhlak. Pesalah anak harus hadir dalam institusi pendidikan yang dicadangkan oleh pegawai akhlak agar mendapat ilmu pengetahuan dalam membentuk dan membina akhlak seorang anak itu.

6. Sekolah Yang Diluluskan⁶⁰

Anak yang akan dihantar ke sekolah yang diluluskan adalah karena sudah melakukan kesalahan dan orang tua/wali atau penjaga atau keluarga pesalah anak tersebut tidak mampu atau tidak dapat menjalankan macam-macam tindakan untuk mengawal kelakuannya dan pesalah anak itu sendiri harus pemulihan dan pengawasan untuk membina semula kelakuan dan budi pekerti yang baik dan mulia. Atas dasar itu mahkamah berpendapat dan harus pesalah anak ini dihantar ke sini. Oleh karena ada banyak kebaikan dan sangat sesuai serta banyak manfaat untuk anak itu masuk ke sekolah yang diluluskan untuk tujuan memulihkan akhlaknya. Perkara berhubung tentang sekolah yang diluluskan telah termaktub mengikut ketentuan yang tertuang di dalam *Bab 4 Akta Kanak-Kanak 2001* yaitu dari *seksyen 65 hingga seksyen 72 Akta* yang sama. Sekolah yang diluluskan ini dicadangkan oleh menteri bagi tujuan pendidikan, dan latihan. Menteri punya kuasa untuk menentukan sekolah yang diluluskan ini mengikut umur dan sesuai untuk anak.

7. Sekolah Henry Gurney⁶¹

⁶⁰ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 67 Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁶¹ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 75 Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

Jika di Malaysia masyarakat umum sudah tahu bahwa Sekolah Henry Gurney adalah suatu tempat bagi anak-anak yang bersalah atas kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman penjara, keluarga *kanak-kanak* itu tidak dapat lagi mengawal kelakuannya, anak-anak itu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, *kanak-kanak* itu sesuai dipulihkan di Sekolah Henry Gurney dan akhir sekali .pada pendapat mahkamah kesalahan yang dilakukan itu adalah dari jenis yang berat dan menahan pesalah anak itu di Sekolah Henry Gurney adalah sesuai untuk memulihkan akhlaknya dan memberantas serta membendung dari *jinayah*.

8. Penjara⁶²

Penahanan pesalah *kanak-kanak* di penjara pula hanya boleh dilakukan sekiranya tiada hukuman lain yang lebih sesuai seperti denda atau dihantar ke suatu tempat tahanan atau sekolah yang diluluskan atau Sekolah Henry Gurney. Hal ini bermakna, sekiranya hukuman lain itu adalah setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya, maka hukuman penjara tidak layak dikenakan terhadap pesalah *kanak-kanak* itu. Selain itu, pesalah *kanak-kanak* boleh dimasukkan dalam penjara sebagai ganti kepada hukuman mati yang dijatuhi oleh mahkamah.⁶³

Sekiranya pesalah *kanak-kanak* dimasukkan ke penjara ia hendaklah diasingkan dan tidak dibenarkan bergaul dengan pesalah dewasa⁶⁴ Jika seseorang diperintahkan supaya ditahan di penjara, Lembaga Hakim Pelawat bagi penjara itu hendaklah mengkaji semula kes orang itu sekurang-kurangnya sekali setahun; dan boleh mengesyorkan kepada *Yang Di Pertuan Agong* atau Raja atau *Yang di Pertua Negeri* supaya orang itu dilepaskan awal atau ditahan lanjut.

⁶² *Lihat* Undang-Undang Malaysia Seksyen 96 (2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁶³ *Lihat* Undang-Undang Malaysia Seksyen 97 (2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁶⁴ *Lihat* Undang-Undang Malaysia Seksyen 96 (3) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

9. Sebat⁶⁵

Sebat (rotan) ialah hukuman yang baru bagi anak, maka dengan itu cara pelaksanaan perintah sebat hendaklah mematuhi undang-undang yaitu:

- a. Sebelum *sebat* dilaksanakan, pesalah anak itu hendaklah diperiksa oleh seorang pegawai perubatan untuk diperakui bahawa pesalah anak itu dalam keadaan kesehatan yang baik untuk menjalani sebatan itu;
- b. Menggunakan rotan yang ringan dengan kekuatan yang sederhana dan petugas yang memukul tidak mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak melukakan kulit anak;
- c. Selepas pesalah anak tersebut *disebat* dengan satu kali, petugas pukul harus mengangkat rotan itu ke atas dan tidak menariknya;
- d. *Sebat* boleh dikenakan pada mana-mana bahagian tubuh kecuali muka, kepala perut, dada atau bahagian-bahagian sulit;
- e. Pesalah anak itu hendaklah memakai pakaian; dan Jika semasa pelaksanaan *sebat* itu pegawai perubatan melapor pesalah anak tidak sakit.
- f. Bahawa jika pesalah anak itu tidak bisa lagi menerima baki hukuman *sebat* itu disebabkan masalah kesihatan diri anak tersebut, maka hukuman *sebat* itu harus dihentikan dan tidak perlu diteruskan.

10. Hukuman Mati⁶⁶

Hukuman mati tidak boleh diumumkan atau dikenakan terhadap anak yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan jika pada hemat Mahkamah dia ialah seorang anak pada masa kesalahan itu dilakukan. Sebagai ganti hukuman mati, Mahkamah akan memerintahkan supaya pesalah anak itu ditahan dipenjara

⁶⁵ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 92 Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁶⁶ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 97 Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611).

selama yang diperkenankan atau persetujuan oleh:⁶⁷

- a. *Yang Di Pertuan Agong* jika kesalahan itu dilakukan di *Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur* atau *Wilayah Persekutuan Labuan*; atau
- b. Raja atau *Yang di Pertua Negeri*, jika kesalahan itu dilakukan di Negeri itu.
- c. Berlaku kesalahan seorang anak dan mana-mana perintah yang dikenakan terhadapnya, ia tidak boleh menjadi bagian daripada jenayah seperti pesalah dewasa dan tidak dianggap ia melakukan kesalahan *jinayah* melainkan anak itu melakukan *jinayah* semasa ia dewasa.

11. Berpindah Kuasa ke Peradilan Tinggi

Mahkamah Bagi Kanak- Kanak akan menyerahkan kuasanya untuk disidangkan pesalah anak ini kepada Peradilan Tinggi yaitu *Mahkamah Tinggi*. Adapun dalam persidangan pidana anak ini mengikut ketentuan yang tertuang di dalam *Kanun Acara Jenayah* dan menggunakan *Akta Kanak- kanak 2001* untuk membuat putusan terhadap pesalah anak-anak⁶⁸ Malahan segala proses persidangan *jinayah* di *Mahkamah Tinggi* adalah seperti pesalah dewasa.⁶⁹ Sebagai contoh jika seorang anak berumur 12 tahun didakwa di *Mahkamah Tinggi* karena membunuh, maka *Mahkamah* berpendapat bahwa jika sekalipun pesalah tersebut seorang anak yang melakukan kesalahan yang bisa dikenakan hukuman mati⁷⁰, namun begitu undang-undang dengan jelas tertulis bahwa hukuman mati tidak boleh dikenakan terhadap pesalah anak.⁷¹

Sebagai ganti, pesalah anak itu hendaklah ditahan selama tempoh, dan di bawah syarat yang dipersetujui oleh *Yang Di-Pertuan Agong*. Adapun jika pesalah anak terdakwa dalam cubaan membunuh diri ,maka *Mahkamah Tinggi* akan memerintahkan anak ini ditahan selama tempoh yang dipersetujui oleh *Yang Di*

⁶⁷ Anita Abdul Rahim, *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka, 2014), hlm 251

⁶⁸ Lihat Seksyen 117 Akta Kanak-kanak 2001

⁶⁹ Lihat Kanun Acara Jenayah..

⁷⁰ Lihat Seksyen 302 Kanun Keseksaan

⁷¹ Lihat Seksyen 302 Kanun Keseksaan

Pertuan Agong.⁷² Bisa juga jika sebagai ganti, pesalah anak itu hendaklah ditahan selama tempoh, dan di bawah syarat yang dipersetujui oleh *Yang Di-Pertuan Agong*. Adapun jika pesalah anak terdakwa dalam cubaan membunuh diri, maka *Mahkamah Tinggi* akan memerintahkan anak ini ditahan selama tempoh yang dipersetujui oleh *Yang Di Pertuan Agong*.⁷³ Bisa juga jika pesalah anak berumur 14 tahun didakwa membunuh dan ia mengaku bersalah, maka pada asalnya ia dihukum mati⁷⁴ tetapi pendakwaan bisa dikurangkan kepada membunuh tanpa niat⁷⁵ dan diganti dengan suatu perintah oleh *Mahkamah Tinggi* terhadap pesalah anak ini agar dihantar di sekolah yang telah diluluskan hingga ia sampai umur 21 tahun.⁷⁶

12. Mahkamah Tinggi di Malaysia

Sudah kita tahu Peradilan Tinggi di Malaysia disebut *Mahkamah Tinggi*. Seksyen 117 Akta Kanak-kanak memberi kuasa kepada Mahkamah Tinggi untuk menggunakan kesemua yang termaktub di bawah *Kanun Acara Jenayah* dan juga di bawah *Akta Kanak-kanak* untuk persidangan pesalah anak.⁷⁷ *Mahkamah Tinggi* menjalankan fungsinya seperti yang tertuang dalam *Kanun Acara Jenayah*, sebagai tambahan di bawah *Akta Kanak-kanak*.

13. Proses Persidangan di Mahkamah Tinggi Bagi Anak

a. Hakim

Persidangan bagi pesalah anak di *Mahkamah Tinggi* disidangkan secara tertutup dengan kuasa hakim dan hanya pihak yang terkait dibenarkan masuk ketika persidangan berlangsung. Namun, perkara

⁷² Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 97 (2) (b) Akta Kanak-kanak 2001

⁷³ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 97 (2) (b) Akta Kanak-kanak

2001

⁷⁴ Lihat Seksyen 302 Kanun Kesiksaan

⁷⁵ Lihat Seksyen 304 (a) Kanun Kesiksaan

⁷⁶ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91 (f) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁷⁷ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 117 Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

tersebut tergantung hakim samaada bersidang secara tertutup atau terbuka dengan ketentuan bahwa *Mahkamah* yang bersidang dalam segala perkara, *sivil* atau *jinayah* hendaklah dianggap sebagai *mahkamah* terbuka kepada pihak awam, dengan syarat *mahkamah* hendaklah punya kuasa untuk mendengar apa-apa perkara secara tertutup untuk keadilan, keselamatan dan keamanan awam.⁷⁸ *Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan* dan *Mahkamah Tinggi* ada kuasa mendengar kasus tertutup yang hanya dibenarkan masuk staf mahkamah termasuk advokat, keluarga pesalah, saksi, pegawai akhlak atau pegawai dari rumah kebajikan⁷⁹.

b. Penetapan Seksyen 91(2) Akta Kanak-kanak

Selain larangan yang diperuntukkan di bawah *seksyen 96 dan seksyen 97, Akta Kanak-kanak* tidak ada apa-apa peruntukan mengenai prosedur khas atau larangan yang diperuntukkan di bawah *Akta Kanak-kanak*, termasuk kaedah-kaedah perbicaraan, terpakai kepada *Mahkamah Tinggi*. Malahan, larangan penggunaan perkataan "*sabit*" dan "*hukuman*" (*conviction and sentence*) di bawah *seksyen 91(2) Akta Kanak-kanak* yang disidangkan di *Mahkamah Bagi kanak-kanak*, tidak digunakan di *Mahkamah Tinggi* bagi suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati.⁸⁰

Hal ini adalah karena, tidak seperti bagi suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati.⁸¹ Hal ini adalah karena, tidak seperti *seksyen 91 Akta Kanak-kanak, seksyen 97 Akta Kanak-kanak* sendiri menggunakan perkataan "*disabit*" (*convicted*). *Seksyen* tersebut menetapkan bahwa hukuman mati tidak boleh diumumkan atau direkodkan terhadap seseorang

⁷⁸ Lihat Seksyen 15(1) Akta Mahkamah Keadilan 1964

⁷⁹ Lihat Seksyen 7 Kanun Acara Jenayah.

⁸⁰ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91(2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

⁸¹ Lihat Undang-Undang Malaysia Seksyen 91(2) Akta Kanak-kanak 2001, (Akta 611).

yang disabitkan atas suatu kesalahan jika pada hemat *Mahkamah* dia seorang anak pada masa kesalahan itu dilakukan.

c. Pembelaan diri diberikan kepada pesalah anak.

Jika suatu kasus *prima facie*⁸² sudah dibuktikan terhadap pesalah anak ini, *Mahkamah Tinggi* memerintahkan kepada pesalah anak membela dirinya.⁸³ Prinsip asas kaedah keadilan asasi bahwa setiap orang yang terdakwa dengan suatu kesalahan *jinayah* hendaklah dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan ia bersalah. Jadi jika seseorang yang terdakwa itu berdiam diri, *adverse inference*⁸⁴ tidak boleh dibuat terhadapnya.

Pesalah anak diberikan tiga pilihan dalam persidangan *jinayah* atau pidana di *Mahkamah Tinggi* dan *Mahkamah Rendah* di negara ini yaitu memberikan keterangan di hadapan hakim dengan bersumpah atau ia membuat keterangan dengan tidak bersumpah atau berdiam diri dengan tidak mengeluarkan apa-apa pernyataan di hadapan hakim. Sudah dijelaskan seperti yang di atas bahwa proses persidangan pesalah anak ini dengan proses persidangan bagi pesalah dewasa adalah sama namun hukuman yang dikenakan terhadap pesalah anak ini adalah berbeda dengan pesalah dewasa.

Berdasarkan penjelasan yang panjang di atas, maka boleh dibuat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak 2001,(Akta 611) di Malaysia. Pertama persamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam proses persidangan anak yang melakukan kesalahan *jinayah* yaitu bernula dari tahap penyidikan, tahap

⁸² *Kamus Undang-Undang Bahasa Inggeris-Malaysia* (Selangor:Oxford Fajar Sdn.Bhd.,1995), hlm 426 yang menyatakan seperti berikut: Prima facie adalah suatu kasus disokong dengan keterangan yang cukup untuk diambil sebagai bukti.

⁸³ *Lihat Seksyen 90(9)(b) Akta Kanak-kanak 2001*

⁸⁴ *Lihat Seksyen 181 hingga 182A Kanun Acara Jenayah.*

⁸⁴ Pendapat yang buruk

penangkapan dan penahanan serta tahap pemeriksaan di sidang pengadilan di negara Indonesia dan Malaysia hampir sama seperti ketika persidangan bagi anak yaitu bersifat tertutup untuk umum.

Namun perbedaan yang berlaku antara negara Indonesia dan Malaysia adalah melibatkan tempat persidangan yang dijalankan. Negara Indonesia tidak ada peradilan khusus bagi anak karena persidangan anak dibuat di peradilan orang dewasa namun disediakan ruang khusus sidang anak dan ruang tunggu anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu persidangan anak didahulukan yaitu dari sidang orang dewasa. Berbeda di negara Malaysia sidang anak dijalankan dan dibuat di peradilan khusus bagi anak yaitu yang dinamakan *Mahkamah Bagi Kanak-Kanak* dan Undang-Undang Perlindungan Anak tergabung dalam Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) berbeda negara Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak terpisah dan tertuang dalam undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perbedaan yang paling besar antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sisitem Peradilan Anak di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak 2001,(Akta 611) di Malaysia adalah hukuman atau sanksi walaupun ada sedikit persamaan terutama yang terkait dengan hukuman mati.⁸⁵

Tabel 1: Contoh Perbandingan Sanksi Pesalah Anak dan Pesalah Dewasa

⁸⁵ Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia.

Mengikuti Undang-Undang Indonesia dan Malaysia.

Kesalahan Pidana.	Pesalah Pidana.	Hukuman atau sanksi UU Indonesia.	Hukuman atau Sanksi UU Malaysia.
Pemerksaan	Dewasa	Penjara paling lama 12 tahun. ⁸⁶	Penjara Paling lama 30 tahun dan rotan ⁸⁷
	Anak	Penjara 6 tahun. ⁸⁸	Penjara 10 tahun ⁸⁹
Pembunuhan	Dewasa	Penjara seumur hidup atau sementara paling lama 20 tahun. ⁹⁰	a.Penjara seumur hidup b.Hukuman mati ⁹¹
	Anak	Penjara paling lama 10 tahun.	a.Dirotan tidak lebih 10 kali. ⁹² b.Penjara kemudian bisa dibebaskan jika dapat pengampunan dan ijin dari YDPA.
Pencurian	Dewasa	Ringan: ⁹³ Penjara paling lama 3 bulan dan dikenakan denda paling banyak Rp900000 Berat: ⁹⁴ Penjara paling lama 7 tahun.	Ringan: Penjara paling lama 10 tahun dan denda mengikut ketentuan dari hakim. Berat: ⁹⁵ Penjara paling lama 20 tahun, dan rotan. Kekerasan: ⁹⁶

⁸⁶ Undang-Undang RI Pasal 285 KUHP

⁸⁷ Undang-Undang Malaysia Seksyen 376 (2) (d) Kanun Keseksaan (Akta 574)

⁸⁸ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

⁸⁹ Undang-Undang Malaysia Seksyen 375B Kanun Keseksaan (Akta 574)

⁹⁰ Undang-Undang RI Pasal 339 KUHP

⁹¹ Undang-Undang Malaysia Seksyen 302 Kanun Keseksaan (Akta 574)

⁹² Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia.

⁹³ Undang-Undang RI Pasal 362 KUHP

¹⁴⁵ Undang-Undang RI Pasal 363 KUH

¹⁴⁶ Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574)

¹⁴⁷ Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574)

		Kekerasan: Penjara paling lama 12 tahun.	Penjara paling lama 20 tahun, denda dan rotan.
	Anak	Diversi ⁹⁷ Ringan. Dipenjara paling lama 1½ Tahun dan denda paling banyak Rp450000 Berat Penjara paling lama 3½ tahun Kekerasan: Penjara paling lama 6 tahun.	Ganti rugi ⁹⁸ Ringan: Dikena hukum penjara paling lama 10 tahun, dan denda berdasarkan tingkat kasus. Berat: Penjara paling lama 20 tahun, dan rotan. Kekerasan Penjara paling lama 20 tahun, denda dan rotan.

Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas terdapat beberapa perbedaan dalam undang-undang antara negara Indonesia dan Malaysia terutama terkait dengan hukuman yang dikenakan terhadap anak. proses dan sanksi pidana bagi pesalah anak yang melakukan kesalahan tindak pidana terdapat beberapa perbedaan menurut undang-undang di Malaysia dan Indonesia. Pesalah anak di Indonesia yang berumur 12 tahun sampai 17 tahun dikenakan hukuman yang sama yaitu ditempatkan di LPKA dan dikenakan hukuman separuh dari hukuman pesalah dewasa berbeda di Malaysia hukuman pesalah anak.

Gambaran secara ringkas dan mudah berdasarkan segala penjelasan yang panjang, penulis berikan dalam bentuk tabel di bawah.

¹⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴⁹ Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia.

Tabel 2: Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan *Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)*.

Undang-Undang Negara	Usia	Hukuman atau Sanksi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. ⁹⁹	Berumur di bawah 12 tahun.	<p>Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Serah kepada orang tua/wali b. Mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
	Berumur 12 tahun sampai 17 tahun.	<p>Pidana penjara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai 18 tahun. b. Dibebaskan bersyarat jika berkelakuan baik setelah 1/2 di LPKA. c. Penjara 1/2 dari maksimum pidana penjara orang dewasa. <p>Pidana mati dan penjara seumur hidup: Penjara paling lama 10 tahun.</p>

¹⁵⁰ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<p>Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia.¹⁰⁰</p>	<p>Berumur 10 tahun dan di bawah 12 tahun.</p>	<p>a. Diberi perlindungan dan undang-undang bersyarat yaitu ketika ia melakukan jenayah tersebut akalinya belum sempurna dalam menimbang keadaan dan kesan perbuatannya.</p> <p>b. Jika akalinya sempurna ketika melakukan jenayah ini, maka tetap dihukum mengikut undang-undang.</p>
<p>Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia.¹⁰¹</p>	<p>Berumur 12 tahun dan 13 tahun</p>	<p>Pidana penjara:</p> <p>a. Bayar ganti rugi b. Dihantar ke sekolah yang diluluskan c. Ditahan tidak lebih 6 bulan.</p> <p>Pidana mati:</p> <p>a. Bayar ganti rugi b. Dihantar ke sekolah yang diluluskan c. Ditahan tidak lebih 6 bulan.</p>
	<p>Berumur 14 tahun sampai 17 tahun</p>	<p>Pidana Penjara:</p> <p>a. Bayar uang jaminan jika berkelakuan baik. b. Ditempatkan ke asrama akhlak atau tempat orang tua/wali atau penjaga,saudara atau tempat yang sesuai dengan dikawal oleh seorang pegawai akhlak. c. Bayar ganti rugi.</p>

¹⁵¹ Akta Kanak-Kanak 2001,(Akta 611).

¹⁵² Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia

		<p>d. Dihantar ke Sekolah Henry Gurney sampai umur 21 tahun.</p> <p>e. Dirotan tidak lebih 10 kali.</p> <p>Pidana Mati:</p> <p>a. Dirotan tidak lebih 10 kali.</p> <p>b. Dipenjara selama tempoh yang dipersetujui oleh Yang Di-pertuan Agong atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri.</p> <p>c. Bisa dibebaskan jika mendapat pengampunan Yang Di-Pertuan Agong.</p>
--	--	--